BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, pengembangan hipotesis atas dasar teori-teori yang berhubungan, serta hasil analisis yang telah dibahas sebagaimana telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi untuk keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jabar I secara umum sudah baik. Berdasarkan dimensi menunjukkan bahwa dimensi *hardware, software, brainware,* prosedur, dan teknologi jaringan komunikasi sudah termasuk dalam kategori baik. Hanya dimensi *database* yang masih termasuk dalam kategori cukup baik.
2. Kebijakan Pajak untuk keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jabar I secara umum sudah baik. Berdasarkan indikator menunjukkan bahwa indikator program, keputusan, dan efek sudah termasuk dalam kategori baik. Hanya indikator tujuan yang masih termasuk dalam kategori cukup baik.
3. Secara total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jabar I belum mencapai target. Diantara 10 KPP yang diteliti hanya 4 KPP yang penerimaannya telah mencapai target, yaitu KPP Cimahi, Bojonagara, Soreang dan Sumedang. Sementara 6 KPP lainnya belum

mencapai target, yaitu KPP Tegallega, Cibeunying, Karees, Cicadas, Purwakarta dan Cianjur.

4. Secara parsial terdapat pengaruh positif sistem informasi terhadap penerimaan pajak, dan pengaruh tersebut termasuk ke dalam kategori tinggi.
5. Secara parsial terdapat pengaruh positif kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak, dan pengaruh tersebut termasuk ke dalam kategori sangat rendah.
6. Secara simultan sistem informasi dan kebijakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Fenomena yang terjadi pada penerimaan pajak yaitu realisasi penerimaan pajak tahun 2011 tidak mencapai target sasaran pemerintah, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh sistem informasi dan kebijakan pajak yang belum mencapai ideal yang diharapkan. Kontribusi sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak adalah sedang, namun kontribusi sistem informasi masih jauh lebih dominan daripada kebijakan pajak

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Sistem Informasi dan Kebijakan Pajakterhadap Penerimaan Pajak PadaKantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jabar I, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakanoleh Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jabar I sebagai berikut:

1. Hasil penelitian atas sistem informasi yang menunjukkan gap dengan kondisi ideal memberikan pengertian bahwa sistem informasi belum berkualitas.

Sistem informasi dapat ditingkatkan kualitasnya melalui perhatian pada *database* terutama yang berkaitan dengan media penyimpanan data. Selain itu KPP harus meningkatkan kapasitas *database* dan keamanan data yang disimpan dalam menjamin objektivitas implementasi sistem informasi.

2. Hasil penelitian atas kebijakan pajak yang menunjukkan gap dengan kondisi ideal memberikan pengertian bahwa kebijakan pajak belum berkualitas. Kebijakan pajak dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya melalui perhatian pada tujuan terutama yang visi misi DJP. Selain itu DJP harus meningkatkan kualitas dalam perumusan kebijakan pajak agar tujuan dari kebijakan pajak dapat tercapai.
3. Hasil penelitian atas penerimaan pajak yang menunjukkan gap antara realisasi dengan target memberikan pengertian bahwa penerimaan pajak masih belum mencapai ideal. 6 KPP yang belum mencapai target yaitu KPP Tegallega, Cibeunying, Karees, Cicadas, Purwakarta dan Cianjur harus meningkatkan kinerjanya dalam menjamin pencapaian target penerimaan pajak.
4. Pada dasarnya penerimaan pajak dengan adanya sistem informasi bisa dikatakan baik. Namun sistem informasi dinilai masih belum terintegrasi dengan baik. Jadi sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak perlu melakukan audit sistem informasi demi menjaga kualitas sistem informasi.
5. Pada dasarnya penerimaan pajak dengan adanya kebijakan pajak bisa dikatakan sangat rendah. Hal ini tentunya menjadi perhatian, dimana kebijakan pajak masih belum memenuhi target penerimaan pajak. Jadi sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak perlu mengevaluasi kebijakan pajak yang

sudah ada, dan membuat kebijakan pajak baru jika memang memungkinkan demi mencapai visi misi Direktorat Jenderal Pajak.

6. Kontribusi sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak diharapkan dapat ditingkatkan lagi agar kondisi yang saat ini masih dalam kondisi sedang dapat memangkas gap hingga mencapai kondisi ideal. Selain itu hal ini diperlukan agar penerimaan pajak dipengaruhi secara seimbang oleh sistem informasi dan kebijakan pajak.